



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN

JALAN IR. SOEKARNO NOMOR 3, DESA PATUNO, KECAMATAN WANGI-WANGI,
KABUPATEN WAKATOBİ, SULAWESI TENGGARA
SURAT ELEKTRONİK : lptk.wakatobi@gmail.com KOTAK POS : 93791

SURAT PENGANTAR

NOMOR B.675/BRSDMKP-LPTK/TU.210/X/2023

Yth. Kepala Pusat Riset Kelautan
di Jakarta

Dengan ini kami kirimkan :

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja (LKj) TW III LPTK	1 (satu) Laporan	Dikirim dengan Hormat untuk menjadi bahan sebagaimana mestinya.

Wakatobi, 17 Oktober 2023

Plt. Kepala Loka,



Aliruddin



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN

JALAN IR. SOEKARNO NOMOR 3, DESA PATUNO, KECAMATAN WANGI-WANGI,
KABUPATEN WAKATOBİ, SULAWESI TENGGARA
SURAT ELEKTRONİK : lptk.wakatobi@gmail.com KOTAK POS : 93791

Wakatobi, 17 Oktober 2023

Kepada Yth.
Kepala Pusat Riset Kelautan
di –
Jakarta

TANDA TERIMA

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja (LKj) LPTK Triwulan III Tahun 2023	1 (satu) Laporan	Dikirim dengan Hormat untuk menjadi bahan sebagaimana mestinya.-

Diterima Tanggal :

Penerima

Nama : Joko Handono, ME
NIP : 19730609 200212 1 003
Jabatan : Subkoordinator Monitoring dan Pelaporan

Tandatangan :

Pengirim

Nama : Amrin Hakim, S.Pi
NIP : 19691025 200212 1 004
Jabatan : Pengelola Monev

Tandatangan : 

Mohon agar lembar Tanda Terina ini dapat dikirimkan kembali melalui email tataoperasonal.lptk@gmail.com



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III

**LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
2023**



TIM PENYUSUN :

Penanggung Jawab : Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan
Ketua : Penanggungjawab Kegiatan Kepala Urusan Umum
Anggota : Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
Pengelola Monitoring dan Evaluasi
Perencana

Kegiatan Urusan Umum
Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan
Alamat: Jl. Ir. Soekarno nomor 03. Wakatobi
Sulawesi Tenggara
e-mail : lptk.wakatobi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya memberikan inspirasi dan semangat untuk menyelesaikan Laporan Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan ini. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan DIPA Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Wakatobi pada Triwulan III Tahun Anggaran 2023 dengan metode penyajian mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja berkewajiban menyelenggarakan SAKIP dan pelaksanaannya disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). LKj merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan a) rencana strategis; b) perjanjian Kinerja; c) pengukuran Kinerja; d) pengelolaan data Kinerja; e) pelaporan Kinerja; dan f) reviu dan evaluasi Kinerja. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) dapat diwujudkan.

Laporan Kinerja ini memberikan informasi kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang terukur atas capaian Triwulan III Tahun Anggaran 2023 dan menjadi bahan perbaikan bagi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada periode berikutnya. Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan tahun 2023 yang merupakan kontrak kinerja tahunan.

Akhirnya, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dari pihak yang turut mendukung penyusunan laporan kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan ini, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya, walaupun masih terdapat kekurangan dalam penyajian dan sistematika penyusunannya. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang dilakukan.

Wakatobi, 17 Oktober 2023

PI. Kepala LPTK,



Airuddin ST

DAFTAR ISI

	Halaman
Tim Penyusun	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
Daftar Gambar	5
Ringkasan Eksekutif	6
BAB. I. PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Tujuan	8
C. Tugas dan Fungsi	8
D. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)	10
E. Sistematika Laporan Kinerja	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis	12
B. Rencana Kerja Tahun 2023	14
C. Perjanjian Kinerja (PK)	14
D. Pengukuran Kinerja	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan III Tahun 2023	18
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	18
C. Akuntabilitas Keuangan Triwulan III Tahun 2023	27
D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya	29
BAB IV. PENUTUP	30
A. Capaian Kinerja Utama	30
B. Permasalahan dan Rekomendasi	31
Lampiran	32

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1. Rencana Kerja LPTK Tahun 2023	14
Tabel II.2. Revisi ke-3 Rencana Kerja LPTK Tahun 2023	15
Tabel II.3. Perjanjian Kinerja LPTK Tahun 2023	15
Tabel III.1. Target dan Realisasi Output LPTK Triwulan III Tahun 2023	19
Tabel III.2. Capaian Kinerja IKK 4 pada Triwulan III Tahun 2023	21
Tabel III.3. Capaian Kinerja IKK 9 pada Triwulan III Tahun 2023	24
Tabel III.4. Capaian Kinerja IKK 10 pada Triwulan III Tahun 2023	25
Tabel III.5. Pagu dan Realisasi Anggaran per Output Triwulan III Tahun 2023	28
Tabel III.6 Pagu dan Realisasi Anggaran per IKK Triwulan III Tahun 2023	28
Tabel III.7. Hasil perhitungan efisiensi anggaran LPTK Triwulan III Tahun 2023	29
Tabel IV.1. Capaian Kinerja LPTK Triwulan III Tahun 2023	30

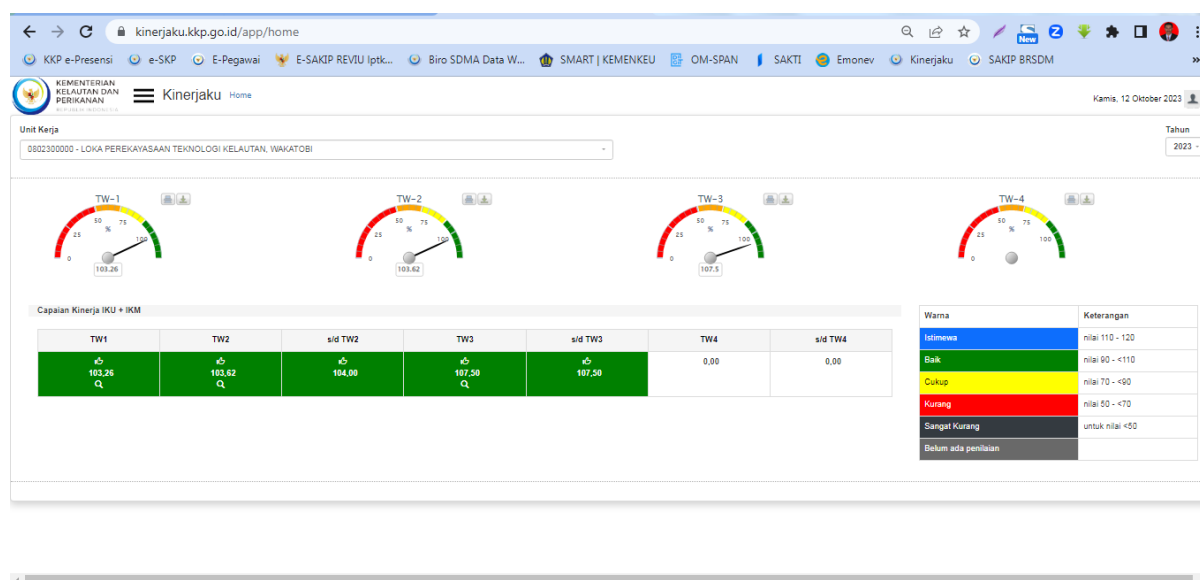
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.1. Struktur Organisasi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	9
Gambar I.2. Komposisi SDM Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	10
Gambar I.3. Rincian PNS Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	10
Gambar III.1. Dashboard Kinerjaku Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	18

RINGKASAN EKSEKUTIF

Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) sebagai institusi riset di bawah BRSDM KP, LPTK bertugas melakukan perekayasaan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. LPTK berkomitmen untuk mendukung program KKP dalam merencanakan program kerjanya sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.40/Men/2011 yang diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/Permen-KP/2020 yaitu: a) penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta laporan dibidang perekayasaan teknologi kelautan; b) pelaksanaan perekayasaan teknologi kelautan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; c) pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama perekayasaan teknologi kelautan dibidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan d) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pengukuran capaian kinerja LPTK Triwulan III Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi Kinerjaku tersebut, diperoleh data capaian kinerja LPTK pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar 107,50%, sebagaimana gambar pada dashboard kinerjaku berikut:



Pada tahun 2022 LPTK memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 1 Sasaran Kegiatan dan 8 Indikator Kinerja Kegiatan sedangkan pada tahun 2023, LPTK memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 2 Sasaran Kegiatan dan 12 Indikator Kinerja Kegiatan. Dari 12 IKK LPTK tersebut, pada Triwulan III tahun 2023 terdapat 3 IKK yang target triwulannya telah tercapai dengan kinerja baik yang ditunjukkan dengan 1 capaian indikator berstatus biru dan 2 capaian indikator berstatus hijau. Rincian target dan realisasi dari 3 IKK tersebut adalah: **IKK 4)** Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK target 100% capaian Triwulan III 100%; **IKK 9)** Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen

Pengetahuan yang Terstandar LPTK target 92% capaian 133.33%; **IKK 10**) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan target 75% capaian 75%, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	TRIWULAN III		%
				T	R	
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	1 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LPTK (unit)	1			
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LPTK	2 Nilai PNBPK LPTK (Rupiah Juta)	3,3			
		3 Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	1			
		4 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	100	100	100	100,00
		5 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK dibandingkan Realisasi Anggaran LPTK TA 2022 (%)	≤ 0,5			
		6 Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	78			
		7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)	75			
		8 Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)	92			
		9 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LPTK (%)	92	92	133,3	120,00
		10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75	75	75	100,00
		11 Nilai IKPA LPTK (nilai)	89			
		12 Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)	82			

Secara umum kinerja LPTK pada triwulan III tahun 2023 sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai kinerja organisasi diatas 100% dan terdapat 1 Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian melampaui target triwulannya yaitu, **IKK 9**) Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LPTK 133.33%. Terhadap capaian atas indikator ini diharapkan tidak terjadi penurunan pada triwulan berikutnya, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta mendorong pencapaian reformasi birokrasi melalui capaian target kinerja, maka pemantauan dan pengukuran kinerja perlu dilakukan secara sistematis dan berkala dalam rangka memitigasi indikator-indikator yang mengalami hambatan dalam pencapaian kinerja perlu dipersiapkan dengan baik.
- 2) Dalam rangka akuntabilitas atas capaian IKU, kegiatan verifikasi berkala menjadi instrumen untuk memonitor dan pengendalian atas progress capaian. Sehubungan dengan hal tersebut, verifikasi capaian perlu dilakukan secara berkala.

Sampai dengan triwulan III tahun 2023, LPTK mengalami beberapa revisi/perubahan Perjanjian Kinerja (PK) antara lain: 1). Revisi PK bulan April terjadi perubahan pejabat dikarenakan adanya pergantian pimpinan Pusriskel. 2). Revisi PK bulan September 2023 terjadi perubahan pejabat dikarenakan adanya pergantian pimpinan pada LPTK. Selain itu terjadi perubahan pengukuran pada IKK 9 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sehingga isian pada aplikasi Kinerja juga dilakukan penyesuaian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden (PERPRES) No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja berkewajiban menyelenggarakan SAKIP dan pelaksanaannya disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan : a) rencana strategis; b) perjanjian kinerja; c) pengukuran kinerja; d. pengelolaan data kinerja; e) pelaporan kinerja; dan f) revaluasi dan evaluasi kinerja. Laporan Kinerja juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat terwujud.

B. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja ini, bertujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Triwulan III Tahun 2023.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi satuan kerja untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Tugas dan Fungsi

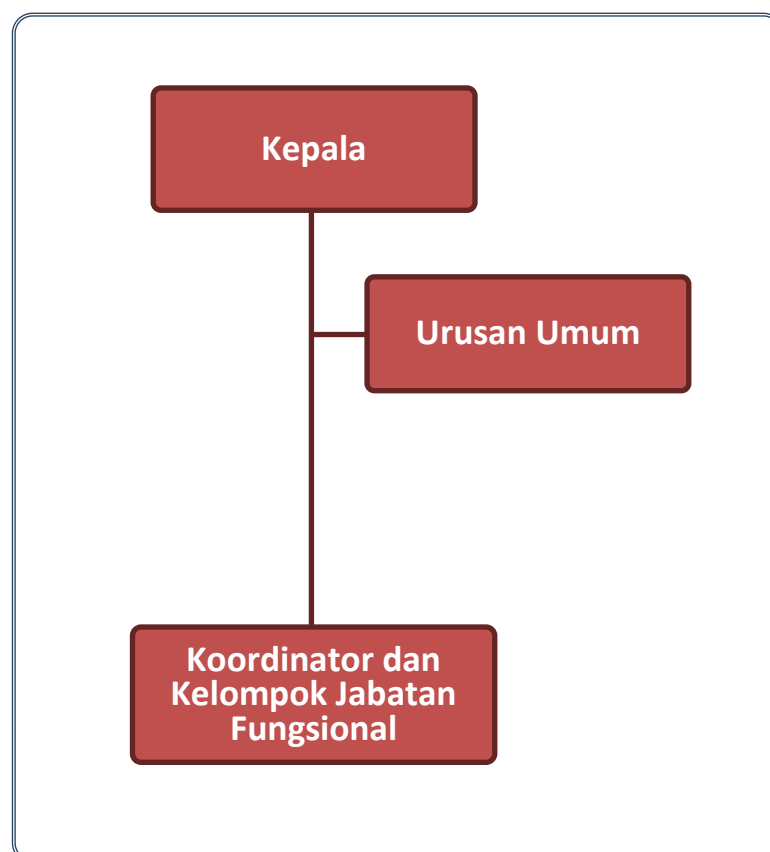
Loka Perencanaan Teknologi Kelautan, yang selanjutnya disebut LPTK, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP). LPTK memiliki tugas melakukan perencanaan teknologi kelautan dalam rangka mendukung visi BRSDM KP, yakni sebagai Inovator IPTEK dan Motivator Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan.

Kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh LPTK diarahkan untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan teknologi yang dilakukan melalui kerjasama lintas instansi, baik pemerintah maupun swasta. Sebagai institusi riset dibawah BRSDM KP, LPTK bertugas melakukan perencanaan dibidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. LPTK berkomitmen untuk mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam merencanakan program kerjanya sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor Per.40/Men/2011 yang diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/Permen-KP/2020 yaitu: a) penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta laporan dibidang perekayasaan teknologi kelautan; b) pelaksanaan perekayasaan teknologi kelautan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; c) pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama perekayasaan teknologi kelautan dibidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan d) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, LPTK dibantu oleh unit kerja dibawahnya yang terdiri dari: a) Urusan Umum; b) Koordinator dan; c) Kelompok Jabatan Fungsional. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

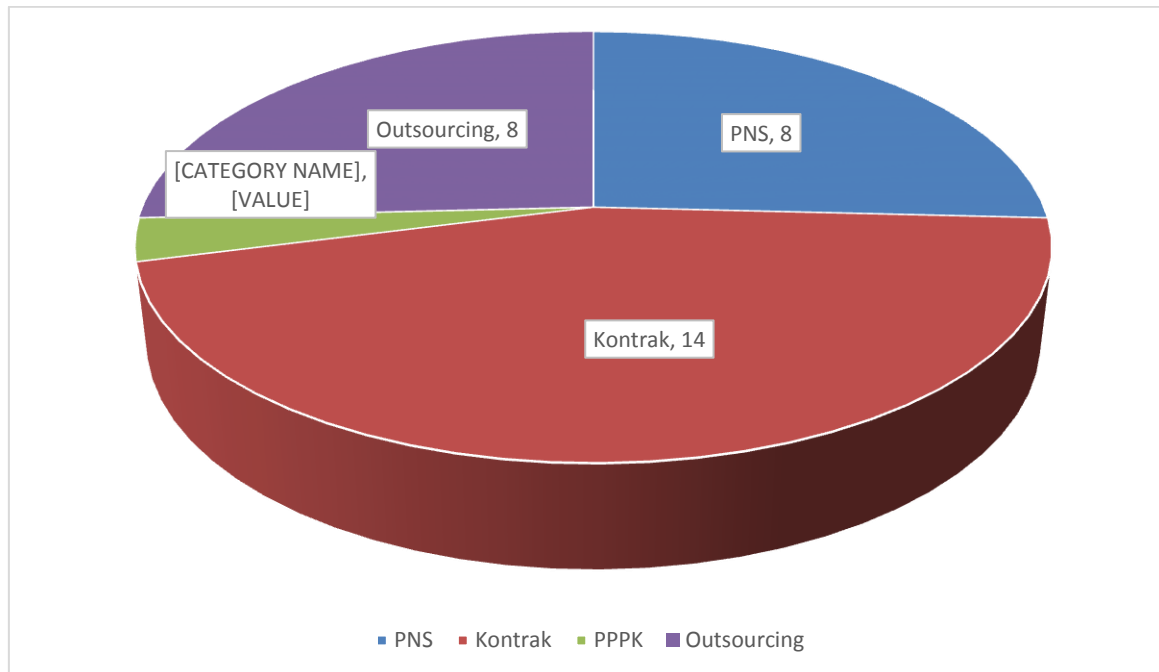
Gambar I.1. Struktur Organisasi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan



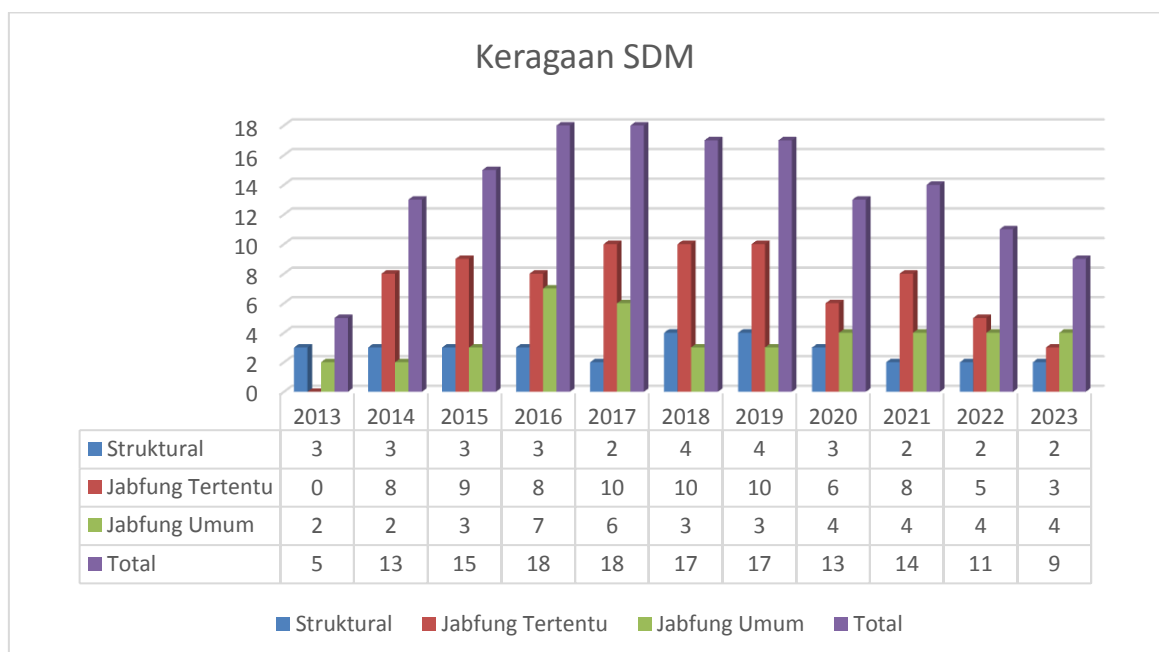
D. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai LPTK sampai dengan triwulan III tahun 2023 sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 8 (delapan) orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1 (satu) orang, pegawai kontrak sebanyak 14 (lima belas) orang dan Outsourcing sebanyak 8 (Delapan) Orang. Komposisi SDM LPTK dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar I.2. Komposisi SDM Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan



Gambar I.3. Rincian PNS Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan



E. Sistematika Laporan Kinerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut :

- 1) **Ringkasan Eksekutif**, Pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Triwulan III tahun 2023.
- 2) **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang LPTK seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di LPTK.
- 3) **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis LPTK 2019 – 2024, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan kinerja LPTK Tahun 2023 serta Pengukuran Kinerja.
- 4) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.
- 5) **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.

BAB II PERENCANAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Loka Perekrayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) tahun 2020 – 2024, mengacu pada Renstra Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) dan Pusat Riset Kelautan (Pusriskel). Visi BRSDM KP dan Pusriskel pada tahun 2020 – 2024 adalah mendukung visi KKP untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi BRSDM KP dan Pusriskel menjadi penting dengan keberadaan LPTK sebagai UPT pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV. Peran strategis keberadaan LPTK yaitu mendukung visi dan misi BRSDM KP dan Pusriskel melalui kegiatan perekrayasaan teknologi kelautan.

Peran strategis LPTK meliputi: 1) merumuskan perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyediaan hasil perekrayasaan teknologi kelautan; 2) menyelenggarakan perekrayasaan teknologi kelautan yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital; 3) menghasilkan perekrayasaan teknologi kelautan inovatif dan implementatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; 4) melaksanakan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran; 5) melakukan sharing Knowledge Base Management System (BMS) dalam mengaplikasikan hasil perekrayasaan teknologi kelautan; 6) mewujudkan tata kelola perekrayasaan yang baik dan melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri; 7) Meningkatkan kontribusi PNBP (royalti dan Hak Kekayaan Intelektual/HAKI) melalui hasil perekrayasaan teknologi kelautan. Berdasarkan hal tersebut, LPTK melakukan penyusunan Renstra 2020 – 2024, untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pusriskel, BRSDM KP dan KKP serta sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 yaitu mewujudkan masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

1. Visi

Visi LPTK pada tahun 2020 – 2024 adalah mendukung visi Pusriskel, BRSDM dan KKP yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

2. Misi

Misi LPTK adalah menjalankan misi Presiden, KKP, BRSDM dan Pusriskel dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, LPTK mendukung 4 (empat) misi yang merupakan modifikasi dari misi yang diemban oleh KKP, BRSDM dan Pusriskel. Modifikasi dilakukan dengan penyesuaian kegiatan yang dilaksanakan oleh LPTK, yaitu :

1. Misi ke-1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan.
2. Misi ke-2: Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan terhadap Perekonomian Nasional melalui Hasil Riset Kelautan.
3. Misi ke-4: Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan.

4. Misi ke-8: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Riset Kelautan. Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi LPTK, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut.

- a) Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
- b) Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
- c) Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan.
- d) Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Sasaran Strategis

LPTK telah menetapkan 2 sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2020 – 2024, setiap sasaran strategis memiliki satuan ukur pencapaian yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Sasaran strategis pertama (SK-1) yang akan dicapai adalah **“Hasil Riset dan Inovasi yang dimanfaatkan”**, dengan indikator kinerja:

- Hasil riset kelautan yang dimanfaatkan oleh masyarakat/sector industri pada tahun 2020 1 paket menjadi 7 hingga tahun 2024.
- Prototipe alat dan mesin hasil riset inovasi teknologi kelautan pada tahun 2020 1 paket menjadi 8 paket hingga tahun 2024.
- Karya Tulis Ilmiah riset kelautan yang dipublikasikan 5 KTI pada tahun 2020, target total capaian KTI sampai dengan tahun 2024 adalah 28 buah KTI yang diterbitkan.
- Jejaring dan/atau kerjasama riset kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti pada tahun 2020 sebanyak 2 dokumen menjadi 15 dokumen hingga tahun 2024.
- Unit kerja riset kelautan yang ditingkatkan sarana dan prasarannya 1 unit pada tahun 2020 menjadi 3 unit hingga tahun 2024.

Sasaran strategis ke dua (SK-2) **“Tatakelola pemerintahan yang baik”** dengan indikator kinerja:

- Indeks Profesionalisme ASN LPTK bernilai 72 hingga tahun 2024.
- Unit kerja LPTK yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar, pada tahun 2020 sebesar 82%.
- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK adalah Baik (88) pada tahun 2020 sampai tahun 2024.
- Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK dibandingkan realisasi anggaran sebesar 1% setiap tahunnya dari 2020 sampai 2024.
- Nilai Kinerja Anggaran LPTK pada tahun 2020 sebesar 85 sampai tahun 2024

5. Potensi dan Permasalahan

a) Potensi

Keberadaan SDM dan IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan riset. Dengan SDM yang dimiliki serta gedung mekatronika kelautan dan Laboratorium Simlan kegiatan perekayasaan yang dilakukan oleh LPTK diarahkan untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan teknologi yang dilakukan melalui kerjasama lintas instansi, baik pemerintah maupun swasta.

b) Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi diantaranya :

- Belum Finalnya OTK LPTK yang disertai tugas dan fungsi yang baru
- Minimnya SDM LPTK yang saat ini tinggal 8 (delapan) orang PNS khususnya jabatan fungsional yang akan mendukung LPTK kedepan.

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) maka tiap tahun ditetapkan Rencana Kerja (Renja). Dokumen rencana kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan rincian kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.1. Rencana Kerja LPTK Tahun 2023

No.	Jenis output	Target	Pagu Anggaran
1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	1 layanan	100.000.000
2	Layanan BMN	1 layanan	20.000.000
3	Layanan Hubungan Masyarakat	1 layanan	25.000.000
4	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 layanan	35.000.000
5	Layanan Umum	1 layanan	75.000.000
6	Layanan Data dan Informasi	1 layanan	20.000.000
7	Layanan Perkantoran	1 layanan	4.072.499.000
8	Layanan Manajemen SDM	11 orang	20.000.000
9	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 dokumen	50.000.000
10	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 dokumen	25.000.000
11	Layanan Manajemen Keuangan	1 dokumen	75.000.000
12	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 dokumen	15.000.000

Anggaran pelaksanaan kegiatan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2023, terdiri dari Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan, Layanan BMN, Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Layanan Umum, Layanan Data dan Informasi, Layanan Perkantoran, Layanan Manajemen SDM, Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan, dan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan dengan total pagu sebesar **Rp. 4.532.499.000,-**

Pada bulan Juli 2023 terjadi pergeseran anggaran kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.2. Revisi ke-3 Rencana Kerja LPTK Tahun 2023

No.	Jenis output	Target	Pagu Anggaran	
			Semula	Menjadi
1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	1 layanan	100.000.000	100.000.000
2	Layanan BMN	1 layanan	20.000.000	20.000.000
3	Layanan Hubungan Masyarakat	1 layanan	25.000.000	25.000.000
4	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 layanan	35.000.000	26.725.000
5	Layanan Umum	1 layanan	75.000.000	93.331.000
6	Layanan Data dan Informasi	1 layanan	20.000.000	20.000.000
7	Layanan Perkantoran	1 layanan	4.072.499.000	4.072.499.000
8	Layanan Manajemen SDM	11 orang	20.000.000	17.209.000
9	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 dokumen	50.000.000	43.480.000
10	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 dokumen	25.000.000	24.255.000
11	Layanan Manajemen Keuangan	1 dokumen	75.000.000	75.000.000
12	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 dokumen	15.000.000	15.000.000

C. Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka dibuat Perjanjian Kinerja LPTK tahun 2023 yang telah menerapkan/menggunakan manajemen kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang berisi langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberi arah bagi para penanggung jawab kegiatan dalam melaksanakan tugas.

Penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Kepala Pusat Riset Kelautan dilakukan pada bulan Januari 2023 terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis dan 12 (duabelas) Indikator Kinerja Kegiatan, namun dalam perjalanannya terdapat beberapa revisi/perubahan antara lain: 1). Revisi PK bulan April terjadi perubahan pejabat dikarenakan adanya pergantian pimpinan PusrisKel. 2). Revisi PK bulan September 2023 terjadi perubahan pejabat dikarenakan adanya pergantian pimpinan pada LPTK. Perjanjian Kinerja Level III antara Kepala LPTK dengan Kepala PusrisKel adalah seperti pada Tabel 2.

Tabel II.2. Perjanjian Kinerja LPTK Tahun 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LPTK (unit)	1
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LPTK	2	Nilai PNBPK LPTK (Rupiah Juta)	3,3
		3	Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	1
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK dibandingkan Realisasi Anggaran LPTK TA 2022 (%)	≤0,5

	6	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	78
	7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)	75
	8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (Nilai)	92
	9	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LPTK (%)	92
	10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
	11	Nilai IKPA LPTK (nilai)	89
	12	Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)	82

D. Pengukuran Kinerja

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja tahun 2023 dapat tercapai.

Pengukuran kinerja LPTK pada tahun 2023 mengacu pada hasil pengukuran yang telah ditetapkan dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat website: <http://kinerjaku.kkp.go.id/app/> Penilaian pencapaian sasaran diukur berdasarkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS).

No.	Validitas IKK	Bobot
1	Lead input	0,1
2	Lead proses	0,2
3	Lag output	0,3
4	Lag outcome	0,4

NPSS adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKK di dalam satu Sasaran Kegiatan (SK). Status capaian SK yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau (buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NPSS perlu diperhatikan bobot masing-masing IKK terhadap SK tersebut dengan indeks toleransi 0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKK. Status capaian NPSS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Baik	Sedang	Buruk
Indeks Capaian > 100 %	Indeks Capaian = 100%	Indeks Capaian < 100 %

Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menyepakati standar status kinerja NPSS sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

KLASIFIKASI			STATUS NPSS (Toleransi 0%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
$X < 100\%$	$X > 100\%$	$X > 100\%$ atau $X < 100\%$	Buruk
$X = 100\%$	$X = 100\%$	-	Sedang
$X \geq 100\%$	$X \leq 100\%$	$X = 100\%$	Baik

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah : Maximize adalah Semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Minimize adalah Semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Stabilize adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

2. Metode Pengukuran Kinerja

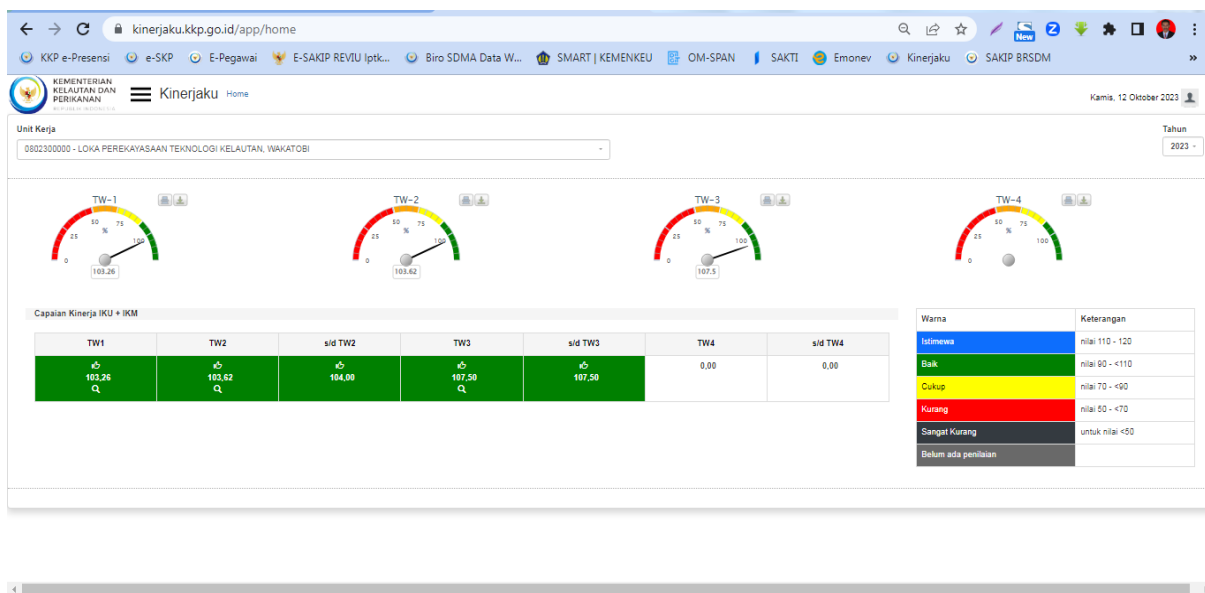
Metode pengukuran kinerja lingkup LPTK dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dikumpulkan data dukung capaiannya dari penanggungjawab masing-masing kegiatan untuk kemudian dilaporkan hasilnya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan III Tahun 2023

Pencatatan dan Pengukuran capaian kinerja LPTK tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LPTK Triwulan III tahun 2023 sebesar 107,50%, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar III.1. Dashboar Aplikasi Kinerjaku LPTK



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan III tahun 2023, terdapat 3 IKK yang telah mencapai target triwulan yang ditetapkan, dengan kinerja baik yang ditunjukkan dengan 1 capaian indikator berstatus biru dan 2 capaian indikator berstatus hijau. Rincian target dan realisasi dari 3 IKK tersebut adalah: **IKK 4)** Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK target 100 capaian Triwulan III 100 dengan persentase sebesar (100%); **IKK 9)** Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LPTK target 92 capaian 133.33 dengan persentase sebesar (120%); **IKK 10)** Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan target 75 capaian 75 dengan persentase sebesar (100%).

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi LPTK. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak kinerja pada Triwulan III Tahun 2023 dapat tercapai.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada masing – masing sasaran strategis sampai dengan Triwulan III tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III.1. Target dan Realisasi Output LPTK Triwulan III Tahun 2023

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TAHUN 2023	TRIWULAN III		%
					T	R	
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LPTK (unit)	1			
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LPTK	2	Nilai PNBK LPTK (Rupiah Juta)	3,3			
		3	Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	1			
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	100	100	100	100,00
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK dibandingkan Realisasi Anggaran LPTK TA 2022 (%)	≤ 0,5			
		6	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	78			
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)	75			
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)	92			
		9	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LPTK (%)	92	92	133,3	120,00
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75	75	75	100,00
		11	Nilai IKPA LPTK (nilai)	89			
		12	Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)	82			

Rincian pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Triwulan III Tahun 2023 yang mengacu Balanced Score Card (BSC) adalah sebagai berikut:

SK 1 : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan

IKK 1 : Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LPTK (unit)

Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LPTK meliputi; pengadaan alat pengolah data yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal.

Capaian kinerja IKK ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2023 dan progress IKK ini sampai dengan triwulan III tahun 2023 belum terdapat capaian kinerja, disebabkan anggaran kegiatan dari IKK ini masih dalam status diblokir.

SK 2 : Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Perencanaan Teknologi Kelautan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 11 (sebelas) IKK sebagai berikut :

IKK 2 : Nilai PNBPN LPTK (rupiah juta)

Memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/Ruang Lingkup PNBPN : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Dasar Hukum Pengelolaan PNBPN :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN;
- b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBPN;
- c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Capaian kinerja IKK ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2023. Progres perkembangan capaian PNBPN ini sampai dengan triwulan III sebesar Rp. 3.096.216 (93,82%) dari target 3,3 juta rupiah. Capaian IKK ini diperoleh dari akun pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan. Pada Triwulan III telah dilakukan beberapa kegiatan yakni berkoordinasi dengan Sekretariat BRSDM mengenai percepatan penerbitan Surat Izin Penghunian Rumah Negara LPTK dan menginisiasi Kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak luar untuk menghasilkan PNBPN.

IKK 3 : Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)

Kerjasama adalah penyelenggaraan kerjasama antara LPTK dengan pihak mitra pada Tahun 2023 yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sedangkan Kemitraan adalah hubungan dengan badan/perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerjasama, Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama stakeholder yang dikoordinasikan/ disetujui oleh BRSDM.

Capaian kinerja IKK ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2023. Progres perkembangan capaian sampai dengan Triwulan III tahun 2023 adalah 1 (satu) naskah perjanjian kerjasama antara Balai Taman Nasional Wakatobi Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Loka Perencanaan Teknologi Kelautan Badan Riset dan Sumber Daya

Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor PKS.665./T.21/TU/KP/04/2023; 11/BRSDM/KKP/PKS/IV/2023 tentang Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Pemulihan Ekosistem Terumbu karang dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pada Wilayah Kerja Balai Taman Nasional Wakatobi yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 5 April 2023.

IKK 4 : Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)

Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK meliputi kegiatan Layanan BMN, kegiatan Pelayanan Kehumasan Riset Kelautan, Kegiatan Layanan organisasi dan Tata Kelola Internal, Kegiatan Layanan Umum, Kegiatan Layanan Data dan Informasi, Kegiatan Layanan Perkantoran, dan Kegiatan Penyelenggaraan Kearsipan Riset Kelautan. Adapun deskripsi capaian atas IKK ini sebagai berikut:

Tabel III.2. Capaian Kinerja IKK 4 pada Triwulan III Tahun 2023

SK-2		Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Perikayasaan Teknologi Kelautan							
IKK-4		Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LPTK (%)							
Realisasi TW III 2020 - 2022			2023					Renstra KKP 2020-2024 (PermenKP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2022- 2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
-	-	100	100	100	100	100,00	0,00	100	100,00

Pada Triwulan III 2023 IKK ini telah mencapai target yang ditetapkan yakni 100%, dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian IKK ini sama bila dibandingkan dengan triwulan III tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Keberhasilan capaian IKK ini adalah dukungan layanan manajemen internal Satker LPTK berupa 21 (duapuluh satu) Laporan capaian kinerja dari target yang ditetapkan sebesar 21 laporan sampai dengan triwulan III, yakni: laporan layanan BMN, laporan pelayanan kehumasan riset kelautan, laporan layanan organisasi dan tata kelola internal, laporan layanan umum, laporan layanan data dan informasi, laporan layanan perkantoran, dan laporan penyelenggaraan kearsipan riset kelautan.

IKK 5 : Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK dibandingkan Realisasi Anggaran LPTK TA 2022 (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK satker merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate

disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan tahun 2022.

Capaian IKK ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2023. Progres perkembangan capaian sampai dengan Triwulan III sebesar 0 %. Hal ini dikarenakan dalam LK Tahun 2022 pada Satker Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan tidak terdapat temuan pengembalian uang ke kas negara.

IKK 6 : Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

Kualifikasi; Kompetensi; Kinerja; dan Disiplin.

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/ Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir;
3. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
 - b. Perilaku kerja;
4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi:
 - a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan
 - b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. Kinerja memiliki bobot 30 % (tiga puluh persen); dan
- d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Faktor pendukung keberhasilan capaian IKK ini adalah terdapatnya kualifikasi Pendidikan pegawai secara menyeluruh, meningkatnya kompetensi pegawai melalui diklat jabatan fungsional, pendidikan dan pelatihan, serta seminar, nilai kinerja satuan kerja dan pegawai yang baik serta tercatatnya pengawasan dan pemantauan disiplin ASN.

Capaian IKK ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2023. Progres capaian IKK ini berdasarkan <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon> sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan yakni 87,88 dengan persentase capaian sebesar 112.67% dari target sebesar 78.

IKK 7 : Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)

Nilai PM SAKIP Loka Perencanaan Teknologi Kelautan dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP LPTK merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon II di lingkungan KKP.

Capaian IKK ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2023. Progres perkembangan capaian sampai dengan Triwulan III adalah terlaksananya kegiatan penataan dokumen SAKIP LPTK periode 5 tahun (2019-2023) dan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) SAKIP lingkup BRSDM dengan capaian nilai sementara PM SAKIP LPTK adalah sebesar 80,05 dan untuk nilai akhir PM SAKIP LPTK menunggu penyampaian resmi dari Biro Perencanaan KKP pada Triwulan IV Tahun 2023.

IKK 8 : Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Penghitungan nilai rekonsiliasi kinerja dilakukan pada 4 (empat) aspek yaitu :

- a. Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IK, Rincian Target IK, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III
- b. Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data.
- c. Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IK + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2023 pada aplikasi kinerjaku
- d. Aspek Ketepatan (A-IV): Aspek Ketepatan dilakukan dengan melihat ketepatan waktu pengiriman LKJ pada Aplikasi ESR dan penyampaian resmi kepada atasan langsung.

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. Capaian IKK ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2023. Progress kegiatan sampai dengan Triwulan III tahun 2023 melakukan verifikasi legalitas dan kesesuaian informasi kinerja pada dokumen perencanaan kinerja tahun 2023, dan telah dilakukan Penilaian Mandiri terhadap Kinerja LPTK.

IKK 9 : Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LPTK (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Pada triwulan III tahun 2023 terdapat perubahan Pengukuran Manajemen Pengetahuan berdasarkan perubahan Manual IKU sebagai berikut:

- ✓ Komponen penilaian semula dokumen (20%) dan keaktifan (80%) menjadi hanya keaktifan (100%);
- ✓ input MP semula menggunakan aplikasi *Bitrix24* menjadi aplikasi *Collaboration Office*;
- ✓ Maksimal skor semula 3 menjadi 4;
- ✓ Pegawai yang wajib dinilai semula: Eselon 2, Koordinator dan Sub Koordinator lingkup pusat menjadi Eselon 2.

Dengan adanya perubahan ini, maka pengukuran IKK ini mulai triwulan III tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan (*collaboration office*) portal.kkp.go.id;
2. Nilai Maksimal Komponen Keaktifan 4 poin;
3. Pengukuran level 3 dihitung dengan lingkup UPT BRSDM;
4. Penghitungan keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 4 point upload keaktifan sesuai bobot point yang telah ditentukan (konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsure 5W1H mendapatkan point 0,5; infografis/visualisasi, grafik dan sedikit teks untuk memudahkan pemahaman audien mendapatkan point 1; karya tulis, jurnal, konten video/campaign bersifat edukasi atau ajakan mendapatkan nilai 3.

TW III* dan TW IV MP Unit Level 2 = Nilai Keaktifan / Target * 100%

Note* : Untuk Nilai Triwulan III (Juli September) Tahun 2023 lingkup UPT BRSDM diambil dari nilai capaian level 2 Unit Kerja Pusat.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja LPTK tahun 2023 ditetapkan target IKK ini adalah sebesar 92%. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3. Capaian Kinerja IKK 9 pada Triwulan III Tahun 2023

SK-2		Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan							
IKK-9		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LPTK (%)							
Realisasi TW III 2020 - 2022			2023					Renstra KKP 2020-2024 (PermenKP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2022- 2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
92,5	88,33	99,35	92	92	133,33	120,00	34,20	92	144,92

Sesuai dengan Surat Kepala BRSDM KP Nomor : B.6388/BRSDM.1/RC.610/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Capaian

IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar TW III Tahun 2023, capaian IKK ini adalah sebesar 133.33, telah melebihi target yang ditetapkan, dari target sebesar 92 realisasi sebesar 133,33 (120%) capaian ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2022 sebesar 99,35. Faktor pendukung keberhasilan capaian IKK ini disebabkan oleh pemanfaatan sistem informasi dalam penyampaian/posting informasi, berita dan kegiatan baik riset maupun manajerial di lingkungan LPTK BRSDM KKP.

Kegiatan yang menunjang tercapainya IKK ini adalah keaktifan pimpinan dalam membagikan/mengupload kegiatan yang dilaksanakan oleh LPTK pada aplikasi Collaboration Office, sehingga diperoleh point maksimal.

IKK 10 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada LPTK berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh LPTK.

Formula perhitungan IK ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Pusat Riset Kelautan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Perjanjian Kinerja LPTK tahun 2023 ditetapkan target IK ini adalah sebesar 75%. Capaian IK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.4. Capaian Kinerja IKK 10 pada Triwulan III Tahun 2023

SK-2		Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan							
IKK-10		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)							
Realisasi TW III 2020 - 2022			2023					Renstra KKP 2020-2024 (PermenKP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2022- 2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
-	100	100	75	75	75	100,00	-25,00	75	100,00

Capaian ini sama apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2022, IKK ini juga tercapai 100%. Capaian IKK ini bersumber dari Surat Nomor : B.6509/BRSDM.1/HP.520/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretariat BRSDM terkait Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP, LPTK mendapat nilai 75% karena tidak ada temuan atau tindaklanjutnya telah tuntas.

Tercapainya IKK ini (tidak ada temuan pengawasan dari itjen) merupakan keberhasilan dari pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang menjadi titik kritis dari kegiatan yang ada di LPTK. Upaya yang dilakukan untuk mencapai IKK ini adalah sering adanya komunikasi tentang realisasi anggaran antara kepala UPT dengan Pusat Riset Kelautan.

IKK 11 : Nilai IKPA LPTK (nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 (delapan) indikator kinerja pelaksanaan anggaran, yaitu Revisi DIPA (10%), Devisiasi RPD (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (5%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian Output (25%).

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di bagi menjadi 4 (empat) antara lain : a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; b) Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$; c) Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau d) Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Untuk penghitungan nilai kinerja anggaran LPTK dengan mengacu pada DJPB, yaitu sebagai berikut :

<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <ul style="list-style-type: none"> Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. <p>Nilai IKPA =</p> $\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi Bobot}$ <p>1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif) Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik $IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$	<p>2. Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik <p>Belanja Pegawai : $DevDIPA BPeg = \frac{ R BPeg n - RPD BPeg n }{RPD BPeg n} \times 100$</p> <p>Belanja Barang : $DevDIPA BBar = \frac{ R BBar n - RPD BBar n }{RPD BBar n} \times 100$</p> <p>Belanja Modal : $DevDIPA BMod = \frac{ R BMod n - RPD BMod n }{RPD BMod n} \times 100$</p> <p>Seluruh Jenis Belanja : $DevDIPA n = \frac{ Dev DIPA BPeg + DevDIPA BBar + Dev DIPA BMod }{3}$</p>
--	--

Nilai efisiensi anggaran diambil dari nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam aplikasi monev PA dengan alamat <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/>

Capaian IKK ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2023. Progres capaian IKPA sampai dengan bulan September adalah sebesar 94,13%. Untuk meningkatkan capaian IKPA, akan dilakukan revisi DIPA tahun 2023 pada Oktober 2023 mengingat ada beberapa belanja yang perlu disesuaikan khususnya pada akun belanja barang.

IKK 12 : Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
- c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
- d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- e. Sangat Kurang, apabila = 50.

Capaian IKK ini akan diukur pada triwulan IV, namun progress kegiatan sampai dengan Triwulan III adalah melakukan pengamatan pada capaian output dan penyerapan anggaran, melakukan komparasi antara realisasi anggaran dan RPD sehingga diketahui tingkat deviasinya dan mengetahui kegiatan-kegiatan mana saja yang perlu dipacu agar jarak deviasi dapat dipersempit, membuat usulan revisi anggaran dan mengikuti Workshop Pengelolaan Anggaran.

C. Akuntabilitas Keuangan Triwulan III Tahun 2023

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003).

Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut : (1) Pertanggungjawaban dana publik; (2) Penyajian tepat waktu; (3) Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah. Pagu anggaran tahun 2023 yang disediakan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) adalah sebesar Rp. 4.532.499.000,.-. Capaian realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2023 sebesar Rp. 1.557.512.099,- atau sebesar 34.36%. Pagu dan realisasi anggaran Triwulan III tahun 2023 berdasarkan rincian output dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel III.5. Pagu dan Realisasi Anggaran per Output Triwulan III Tahun 2023

Kode Nama dan Kegiatan		Keuangan		
		Pagu	Realisasi	%
1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	100.000.000	-	0,00
2	Layanan BMN	20.000.000	12.583.723	62,92
3	Layanan Hubungan Masyarakat	25.000.000	21.990.445	87,96
4	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	26.725.000	22.549.312	84,38
5	Layanan Umum	93.331.000	77.064.159	82,57
6	Layanan Data dan Informasi	20.000.000	16.198.300	80,99
7	Layanan Perkantoran	4.072.499.000	2.749.931.822	67,52
8	Layanan Manajemen SDM	17.209.000	8.171.633	47,48
9	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	43.480.000	43.416.965	99,86
10	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	24.255.000	24.173.348	99,66
11	Layanan Manajemen Keuangan	75.000.000	54.201.991	72,27
12	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	15.000.000	14.519.297	96,80
Total		4.532.499.000	3.044.800.995	67,18

Tabel III.6 Pagu dan Realisasi Anggaran per IKK Triwulan III Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	1 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LPTK (unit)	100.000.000	-	0,00
2 Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan LPTK	2 Nilai PNBPK LPTK (Rupiah Juta)	1.500.000	900.000	60,00
	3 Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	16.788.000	16.690.445	99,42
	4 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	4.225.711.000	2.884.948.313	68,27
	5 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK dibandingkan Realisasi Anggaran LPTK TA 2022 (%)	65.928.000	49.701.991	75,39
	6 Indeks Profesionalitas ASN LPTK (indeks)	20.000.000	8.171.633	40,86
	7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)	50.000.000	43.416.965	86,83
	8 Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)	16.180.000	16.136.216	99,73
	9 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LPTK (%)	18.500.000	12.298.300	66,48
	10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	4.572.000	-	0,00
	11 Nilai IKPA LPTK (nilai)	4.500.000	4.500.000	100,00
	12 Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)	8.820.000	8.037.132	91,12
	Total		4.532.499.000	3.044.800.995

Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa selama Triwulan III Tahun 2023 IKK yang disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja telah diakomodir dan didukung dengan ketersediaan anggaran. Pengalokasian anggaran yang tepat dapat mendorong kinerja pencapaian output yang baik. Dalam perjalanannya tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya

Sebagai organisasi sektor publik LPTK dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Sumber daya ekonomi tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, modal, serta wirausaha (entrepreneur). Alokasi sumber daya ekonomi berarti penentuan banyaknya jumlah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan wirausaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Manfaat mengetahui alokasi sumber daya ekonomi adalah menjadi bahan pertimbangan manusia dalam melakukan perencanaan kebijakan ekonomi terutama terkait penggunaan sumber daya alam. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian untuk mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Tabel III.7. Hasil perhitungan efisiensi anggaran LPTK Triwulan III Tahun 2023

Unit Kerja	Jumlah IKU	NPSS	Pagu (Rp)	Realisasi		Efisiensi Anggaran
				(Rp)	%	
LPTK	12	107,5	4.532.499.000	3.044.800.995	67,18	67%

BAB IV PENUTUP

A. Capaian Kinerja Utama

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menggunakan aplikasi Kinerjaku, pada Triwulan III tahun 2023 tahun 2023, Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan memiliki kinerja yang baik dengan nilai 107,05%. Pengukuran ini dilakukan dengan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (*key performance indicator/KPI*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Triwulan III tahun 2023 tahun 2023, telah memenuhi target yang ditetapkan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel IV.1. Capaian Kinerja LPTK Triwulan III Tahun 2023

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023	TRIWULAN III		%
				T	R	
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	1 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LPTK (unit)	1			
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LPTK	2 Nilai PNBK LPTK (Rupiah Juta)	3,3			
		3 Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	1			
		4 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	100	100	100	100,00
		5 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK dibandingkan Realisasi Anggaran LPTK TA 2022 (%)	< 0,5			
		6 Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	78			
		7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)	75			
		8 Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)	92			
		9 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LPTK (%)	92	92	133,3	120,00
		10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75	75	75	100,00
		11 Nilai IKPA LPTK (nilai)	89			
		12 Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)	82			

Dari hasil pengukuran kinerja di atas, terdapat 3 IKK yang telah mencapai target triwulan yang ditetapkan, dengan kinerja baik yang ditunjukkan dengan 1 capaian indikator berstatus biru dan 2 capaian indikator berstatus hijau. Rincian target dan realisasi dari 3 IKK tersebut adalah: **IKK 4)** Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK target 100 capaian Triwulan III 100 dengan persentase sebesar (100%); **IKK 9)** Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LPTK target 92 capaian 133.33 dengan persentase sebesar (120%); **IKK 10)** Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK

yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan target 75 capaian 75 dengan persentase sebesar (100%)

Terdapat 1 Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian melampaui target tahunannya, yaitu **IKK 9)** Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LPTK target 92 capaian 133.33 dengan persentase sebesar (120%). Terhadap capaian atas indikator ini diharapkan tidak terjadi penurunan pada triwulan berikutnya.

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Permasalahan

- ❖ Masih terdapat anggaran belanja modal yang diblokir sehingga dapat mempengaruhi Nilai Kerja Anggaran Satker
- ❖ Terdapat sisa anggaran yang tidak terserap khususnya pada belanja pegawai dan belanja barang.
- ❖ Belum diisinya volume KRO pada capaian output sehingga mempengaruhi nilai NKA dan IKPA Satker

Rekomendasi

- Segera melakukan revisi untuk membuka blokir belanja modal.
- Segera menyiapkan revisi DIPA agar dapat dilakukan pergeseran pada belanja yang tidak terserap agar realisasi anggaran pada akhir tahun dapat maksimal.
- Volume KRO pada capaian output harus disesuaikan dengan realisasi yang ada.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LAGAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
PUSAT RISET KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Efi Noferya Manafi
Jabatan : Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yayan Hikmayani
Jabatan : Pjt.Kepala Pusat Riset Kelautan

Sejaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Januari 2023

Pihak Kedua
Pjt. Kepala Pusat Riset Kelautan

Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan

Efi Noferya Manafi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
PUSAT RISET KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LPTK (unit)	1
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LPTK	2	Nilai PNBK LPTK (Rupiah Juta)	3,3
		3	Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	1
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK dibandingkan Realisasi Anggaran LPTK TA 2022 (%)	≤ 0,5
		6	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	78
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)	75
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)	92
		9	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LPTK (%)	92
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		11	Nilai IKPA LPTK (nilai)	89
		12	Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	<i>Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan</i>	100.000.000
2	<i>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</i>	4.432.499.000
TOTAL ANGGARAN LPTK TAHUN 2023		4.532.499.000

Jakarta, 18 Januari 2023

Pihak Kedua
Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan


Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan


Efi Noferya Manafi



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711585
LAMAR www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
PUSAT RISET KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Efi Noferya Manafi**

Jabatan : **Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hendra Yusran Siry**

Jabatan : **Kepala Pusat Riset Kelautan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 April 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan

Hendra Yusran Siry

Pihak Pertama
Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan

Efi Noferya Manafi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
PUSAT RISET KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LPTK (unit)	1
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LPTK	2	Nilai PNBK LPTK (rupiah juta)	3,3
		3	Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	1
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK dibandingkan Realisasi Anggaran LPTK TA 2022 (%)	≤ 0,5
		6	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (indeks)	78
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)	75
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)	92
		9	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LPTK (%)	92
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		11	Nilai IKPA LPTK (nilai)	89
		12	Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	<i>Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan</i>	100.000.000
2	<i>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</i>	4.432.499.000
TOTAL ANGGARAN LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR TAHUN 2023		4.532.499.000

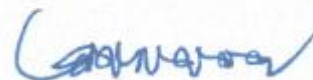
Jakarta, 18 April 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan



Hendra Yusran Siry

Pihak Pertama
Kepala Loka Perencanaan
Teknologi Kelautan



Efi Noferya Manafi



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
PUSAT RISET KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aliruddin**

Jabatan : Plt. Kepala Loka Perencanaan Teknologi Kelautan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hendra Yusran Siry**

Jabatan : Kepala Pusat Riset Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 September 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan

Hendra Yusran Siry

Pihak Pertama
Plt. Kepala Loka Perencanaan
Teknologi Kelautan

Aliruddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
PUSAT RISET KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LPTK (unit)	1
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LPTK	2	Nilai PNBK LPTK (rupiah juta)	3,3
		3	Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	1
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK dibandingkan Realisasi Anggaran LPTK TA 2022 (%)	≤ 0,5
		6	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (indeks)	78
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)	75
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)	92
		9	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LPTK (%)	92
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		11	Nilai IKPA LPTK (nilai)	89
		12	Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	<i>Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan</i>	100.000.000
2	<i>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</i>	4.432.499.000
TOTAL ANGGARAN LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN TAHUN 2023		4.532.499.000

Jakarta, 1 September 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan



Hendra Yusran Siry

Pihak Pertama
Plt. Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan



Aliruddin